



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 03 September 2018

Halaman: 2

## Syarat Ditata Warga Harus Punya SKT

**Penataan Kawasan Kumuh Fokus ke Bantaran Winongo**

JOGJA - Penataan kawasan kumuh di Kota Jogja dimulai dengan pengurusan surat keterangan tanah (SKT). Kepemilikan SKT oleh masyarakat menjadi dasar bagi Pemkot Jogja untuk melakukan penataan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kota Jogja Hari Satya Wacana mengakui SKT tersebut menjadi acuan status tanah. "Jika tanah milik Keraton, pihak Kraton harus memberikan kekancingan," ujarnya kemarin (2/9).

Menurut Hari untuk melakukan penataan kawasan kumuh butuh kerjasama berbagai pihak. Termasuk Keraton maupun Kadipaten Pakualaman yang memiliki SG atau PAG. Juga ada Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO)

serta Pemprov DIJ. "Salah satu kendala dalam penataan adalah masyarakat sulit yang sulit untuk ditata," katanya.

Terpisah Kepala Seksi Peningkatan Perairan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jogja Herka Hamung Wijaya juga mengakui SKT jadi persoalan di lapangan. Program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan Badan Pertanahan Nasional dianggap sebagai salah satu solusi. "Warga mengajukan pembuatan SKT nanti jalurnya lewat dari BPN, akan diberi rekomendasi dari Balai BBWSO dan Keraton sebagai pemilik tanah untuk," ujarnya.


Herka menambahkan pada tahun ini fokus penataan di kawasan sungai Winongo. Dengan Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Ada 11 kelurahan mulai dari Kricak di Tegalarjo hingga Gedongkiwo Mantrijeron yang disasar. (cr5/prs/zl)

Instansi

1. Dinas Pertanahan
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Narasumber

Dispetarung



MADEP KALI: Sebagian rumah di bantaran sungai Winongo di Kota Jogja masih membelakangi sungai. Salah satu penataan kawasan sungai dengan program mundur, munggh, madep kali (M3K)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005